

MOTIF KECENDERUNGAN PERILAKU *FRAUD* ASN: PERSPEKTIF *FRAUD DIAMOND THEORY*

Paramita Budirahayu¹, David Adechandra Asedica Pseudo²

Universitas Kristen Satya Wacana^{1,2}

²Corresponding author: david.pseudo@uksw.edu

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 08/03/2023

Revisi pertama tanggal: 27/04/2023

Diterima tanggal: 15/05/2023

Tersedia online tanggal: 27/06/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota X dengan menggunakan pendekatan *Fraud Diamond Theory*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer. Pengumpulan data diawali dengan wawancara semi terstruktur bersama perwakilan dari Aparatur Sipil Negara di setiap bagian yang ada di OPD Kota X dan kemudian diperdalam melalui observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kecurangan dalam bentuk penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Kecenderungan perilaku *fraud* yang terjadi didasari karena adanya niat dalam diri ASN untuk melakukan kecurangan yang didorong dengan adanya motif berupa tekanan, rasionalisasi, kesempatan, dan kemampuan sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud Diamond Theory*. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota X untuk dapat memitigasi kemungkinan terjadinya *fraud*.

Kata Kunci: Kecenderungan *fraud*, *fraud diamond*, pemerintah

ABSTRACT

This study uses the Fraud Diamond Theory approach to explore the motives of the State Civil Apparatus in the Regional Apparatus Organization City X. This research is a qualitative descriptive study using primary data collection techniques. Data collection began with semi-structured interviews with representatives of the State Civil Apparatus in each section of Regional Apparatus Organization City X and deepened through observation. The results of this study indicate that fraud is still found in the form of asset misuse by the State Civil Apparatus. The tendency for fraudulent behavior to occur is based on an intention within the Regional Apparatus Organization to commit fraud driven by motives in the form of pressure, rationalization, opportunity, and ability, as explained in the Fraud Diamond Theory. The results of this study can be used as evaluation material for City X Regional Apparatus Organizations to mitigate the possibility of fraud.

Keywords: Fraud tendency, fraud diamond, government

1. Pendahuluan

Di era modern ini, praktik-praktik kecenderungan *fraud* semakin marak terjadi di sektor pemerintahan yang dituding sebagai dampak dari krisis ekonomi tahun 1998 (Didi & Kusuma, 2018). Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan lembaga survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2020) ditemukan hasil *fraud* dalam bentuk korupsi sebesar 64,4%, *fraud* dalam bentuk penggelapan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, dan *fraud* dalam bentuk laporan keuangan sebesar 6,7%. Beberapa bentuk *fraud* yang kerap ditemukan di sektor pemerintahan yaitu berupa *fraud* korupsi, manipulasi laporan keuangan, serta manipulasi penyaluran dana atau aset negara (Wijayanto, 2020). Korupsi menjadi salah satu *fraud* yang dominan di sektor pemerintahan karena *fraud* tersebut masih sering kali terjadi. Korupsi di sektor pemerintahan dijabarkan dari sisi pencurian barang publik untuk kepentingan individu, suap menyuap, penggelapan uang, pencucian uang, serta pemberian perlindungan (Maulana & Muftadi, 2018). Namun, *fraud* di sektor pemerintahan tidak hanya dibatasi pada korupsi saja, melainkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik seperti pegawai negeri dan politisi, serta pihak yang secara sengaja ikut melakukan tindakan yang ilegal guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok (Didi & Kusuma, 2018).

Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa Kejaksaan Agung telah menangani 371 kasus korupsi dengan 814 tersangka, dimana kasus yang kerap ditangani berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (Data Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa praktik *fraud* korupsi di Indonesia khususnya di sektor pemerintahan kerap kali terjadi. Salah satu kasus tindakan korupsi yang ditemukan di sektor pemerintahan yaitu kasus tindak pidana korupsi Pajak Penghasilan (PPH 21) tahun 2008 sampai 2018 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Kompas, 2022).

Fraud akan kerap terjadi apabila pencegahan dan pendeteksian di dalam suatu organisasi tidak berjalan maksimal. Konsep yang menjelaskan terkait penyebab seseorang untuk melakukan *fraud* relatif beragam. *Fraud Triangle Theory* merupakan salah satu konsep yang kerap digunakan untuk mengungkap *fraud*, dimana tiga faktor tahapan dari konsep ini saling berkaitan (Maria *et al.*, 2019). Tiga faktor tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Guna memaksimalkan pencegahan dan pendeteksian *fraud*, maka tiga faktor tersebut dikembangkan dengan menambahkan unsur baru yaitu kemampuan atau *capability* (Wolfe & Hermanson, 2004). Empat unsur ini dikenal sebagai *Fraud Diamond Theory*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konsep lain untuk meninjau adanya *fraud* yaitu dengan menggunakan perspektif *fraud diamond* (Yesiariani & Rahayu, 2017). Faktor *capability* merupakan faktor yang kerap berhubungan dengan posisi atau jabatan seseorang dalam suatu organisasi.

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan, tetapi hasil dari penelitian tersebut memiliki perbedaan. Didi & Kusuma (2018) menyatakan bahwa faktor pengendalian internal dan penegakan peraturan berpengaruh terhadap *fraud*, dan untuk keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, serta budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil penelitian dari Farah & Rahmawati (2021)

menyatakan bahwa sikap rasionalisasi yang ada pada diri seorang ASN memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *fraud*, sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di instansi pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Penelitian Permana *et al.*, (2017) menunjukkan hasil bahwa efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan di instansi pemerintah, dan budaya etika organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan di instansi pemerintah. Penelitian lain menyatakan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi merupakan faktor yang menyebabkan *fraud* dan variabel lain yang berpengaruh adalah kelayakan kompensasi dan perilaku tidak etis (Haurissa & Dewi, 2021).

Hasil penelitian lainnya oleh Wijayanto (2020) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah faktor kapabilitas yang menunjukkan pengaruh positif, sedangkan gaya kepemimpinan memperlemah komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Maulana & Muhtadi (2018) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan dalam pemerintahan, sedangkan sistem kontrol internal dan dualisme posisi berpengaruh positif terhadap kecurangan di pemerintah. Hasil penelitian dari Rokhim & Jaya (2021) juga menemukan bahwa kompensasi, gaya kepemimpinan, budaya etis organisasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan, sedangkan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan yang ada di pemerintah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya menyajikan penelitian dengan menguji pengaruh dan hasil penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan mengeksplorasi motif ASN melakukan *fraud* secara lebih mendalam. Perbedaan penelitian ini juga terletak pada lokasi dan unit analisis yang dituju. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu di lingkungan Pemerintah Kota X, Provinsi YZ (nama disamarkan untuk alasan pertimbangan etis) dengan unit analisis OPD Kota X. OPD Kota X, Provinsi YZ merupakan salah satu OPD yang memiliki alokasi anggaran tertinggi dengan serapan anggaran 81,25% (Radar Semarang, 2022).

Masalah utama dari penelitian adalah adanya kecenderungan melakukan *fraud* oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota X, Provinsi YZ. Adanya fenomena korupsi yang dilakukan oleh salah satu pensiunan ASN Pemerintah Kota X, Provinsi YZ menunjukkan bahwa masih terdapat ASN Pemerintah Kota X, yang memiliki kecenderungan untuk melakukan *fraud*. Hal itu juga mengindikasikan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang Aparatur Sipil Negara Kota X, Provinsi YZ memiliki kecenderungan untuk melakukan *fraud*. Dengan adanya serapan anggaran yang tinggi juga menjadi indikator untuk unit analisis melakukan program kerja yang beragam, sehingga kemungkinan kecenderungan untuk melakukan *fraud* bisa saja terjadi. Fenomena tersebut menjadi dasar mengapa penelitian ini dilakukan sebab kecenderungan kecurangan yang tidak dimitigasi dapat merugikan instansi maupun negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota X cenderung melakukan *fraud*. Penelitian ini juga bermanfaat bagi beberapa pihak. Pertama, bagi Pemerintah Kota X, yaitu sebagai bahan evaluasi dalam menelaah seseorang ASN dalam melakukan *fraud*. Kedua, dapat bermanfaat bagi akademisi, yaitu dapat memberikan andil dalam

pengembangan ilmu khususnya bidang akuntansi. Secara teoretis, penelitian ini mampu menambah literatur terkait motif kecenderungan perilaku *fraud* ASN ditinjau dari konsep *Fraud Diamond Theory*.

2. Kajian Literatur

Setiap organisasi rentan terhadap *fraud*, dimana *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak legal. Seseorang yang ingin melakukan tindakan *fraud* cenderung didasari niat dari diri sendiri terlebih dahulu. Niat seseorang untuk melakukan *fraud* relatif bermacam-macam (Chandra & Ikhsan, 2014). Niat melakukan *fraud* dapat dideteksi dengan ada atau tidaknya faktor kesempatan (*opportunity*) dalam melakukan tindakan *fraud*. Peluang yang besar biasanya cenderung memudahkan seseorang untuk melakukan *fraud*, sehingga tindakan *fraud* akan sering terjadi. Tidak hanya faktor peluang saja, tetapi banyak faktor lain yang menyebabkan seseorang memiliki niat untuk melakukan *fraud*. Beberapa faktor lain seseorang cenderung memiliki niat melakukan *fraud* adalah tekanan dan rasionalisasi (Farah & Rahmawati, 2021). Apabila seseorang memiliki tekanan (*pressure*) dan sikap rasionalisasi (*rationalization*) yang tinggi, maka semakin tinggi pula kemungkinan niat untuk melakukan *fraud*. Munculnya kecenderungan perilaku *fraud* dari seseorang juga disebabkan dari aktivitas dan kebiasaan yang menjadi budaya di organisasi (Ramadhani *et al.*, 2019).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan *fraud* atau kecurangan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan sumber daya organisasi (ACFE, 2016). Romney & Steinbart (2011) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan secara sengaja yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dan tindakan yang menimbulkan kerugian ekonomi. *Fraud* didefinisikan sebagai kecurangan akuntansi yang secara sengaja dilakukan untuk memanipulasi pengguna dan pembaca laporan keuangan guna mendapatkan keuntungan pribadi (Merawati & Mahaputra, 2017). Kecenderungan *fraud* merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang yang cenderung untuk melakukan kecurangan dalam berbagai bentuk seperti manipulasi penyajian laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016)* menjelaskan bahwa kecurangan dikategorikan ke dalam tiga bentuk kecurangan yaitu: *fraud* laporan keuangan, korupsi, dan penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan.

Romney & Steinbart (2011) menjelaskan bahwa munculnya *fraud* dapat ditinjau dari tiga elemen faktor yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dimana faktor ini disebut sebagai *Fraud Triangle*. Untuk menyempurnakan konsep *Fraud Triangle*, maka konsep ini dikembangkan menjadi *Fraud Diamond*. *Fraud Diamond Theory* ini dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) sebagai penyempurnaan konsep *Triangle Fraud Theory*, dimana konsep ini memberikan pandangan baru terkait dengan fenomena *fraud*. Konsep ini memberikan tambahan satu faktor kualitatif yang mempengaruhi *fraud* yaitu kemampuan (*capability*), dimana faktor ini diperlukan seseorang untuk melakukan *fraud*. *Fraud Diamond Theory* menyatakan bahwa *fraud* tidak hanya berfokus pada faktor

tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi tetapi juga mempertimbangkan faktor *individual's capability* atau kemampuan individu (Purwanto *et al.*, 2017).

Faktor pertama dalam *fraud diamond* yaitu faktor tekanan, dimana tekanan merupakan dorongan yang menyebabkan individu maupun kelompok melakukan kecurangan. Faktor tekanan dapat ditinjau dari faktor internal dan juga faktor eksternal. *Fraud* yang muncul akibat dari faktor tekanan dapat berasal dari respon terhadap tekanan ekonomi, finansial, gaya hidup di luar kemampuan, pengeluaran yang besar, hutang, atau ketidakmampuan mengatur keuangan (Priyastiyi & Setyowati, 2021). Dorongan dari faktor tekanan sendiri dapat diklasifikasikan dari faktor *financial* dan faktor *non-financial* (Sulistiyo *et al.*, 2020). Merawati & Mahaputra (2017) juga menyatakan bahwa tekanan untuk melakukan *fraud* dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, nilai (*values*), alasan emosional, dan akibat dari desakan keserakahan.

Faktor kedua, berkaitan dengan faktor kesempatan (*opportunity*) yang merupakan situasi maupun kondisi seseorang yang memunculkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Faktor ini timbul karena lemahnya pengendalian internal yang dimiliki organisasi, dimana celah kelemahan pengendalian internal itulah yang dimanfaatkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kesempatan juga dapat muncul akibat dari kurangnya kedisiplinan, lemahnya pengaksesan informasi, tidak adanya mekanisme audit, apatis terhadap lingkungan sekitar, dan tata kelola organisasi yang buruk (Mardatillah *et al.*, 2020). Lemahnya pengawasan yang ada di suatu organisasi juga menjadi salah satu motif kesempatan untuk seseorang melakukan *fraud* (Fransiska & Utami, 2019). Argumentasi sejalan juga menjelaskan bahwa peluang muncul karena adanya kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang memahami sistem tersebut sehingga dapat melakukan kecurangan (Avianto *et al.*, 2019).

Faktor selanjutnya adalah rasionalisasi yang merupakan usaha seseorang untuk mencari pembenaran atas tindakan ilegal yang dilakukan. Rasionalisasi termasuk faktor yang tidak dapat diamati karena rasionalisasi berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang ketika akan melakukan *fraud* (Puspasari & Suwardi, 2016). Rasionalisasi umumnya terjadi di pikiran seseorang yang ingin melakukan *fraud*, dimana faktor ini menyakinkan tindakan yang telah dilakukan adalah tindakan yang benar, padahal tindakan yang dilakukan termasuk tindakan yang salah. Seseorang akan mencari celah alasan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk legitimasi (Rokhim & Jaya, 2021). Hampir semua *fraud* melibatkan unsur rasionalisasi karena setiap pelaku yang melakukan kecurangan akan mencari pembenaran atas perbuatannya (Prasmaulida, 2016). Tetapi, kesempatan merupakan elemen yang paling mungkin diminimalkan melalui proses, prosedur, pengendalian dan upaya mendeteksi dini terhadap *fraud* (Puspasari, 2015).

Faktor terakhir dari *fraud diamond* adalah kemampuan (*capability*). Sesuai dengan penjelasan Sujeewa *et al.* (2018) bahwa sifat dan kemampuan seseorang diperlukan untuk mengenali peluang kecurangan dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Beberapa sifat dan kapasitas yang dimiliki seseorang dalam melakukan kecurangan adalah posisi dalam organisasi, kecerdasan untuk mengeksploitasi pengendalian internal, ego, dan kemampuan untuk mengatasi risiko akibat melakukan kecurangan (Airlangga, 2020). Dalam suatu organisasi, seseorang yang memiliki posisi atau kewenangan cenderung memiliki *capability* dalam mengeksploitasi kesempatan untuk

melakukan *fraud* (Priyastiwi & Setyowati, 2021). Individu yang memiliki *capability* lebih tinggi cenderung mempunyai pengaruh lebih besar dalam suatu organisasi, sehingga kemungkinan untuk melakukan *fraud* semakin besar juga (Wijayanto, 2020). Peprah (2018) menyatakan bahwa kapabilitas terkait dengan kecerdasan dan peran otoratif yang dimiliki seseorang dalam posisi jabatan akan dengan mudah dimanfaatkan untuk mencari kelemahan internal di tengah tekanan dan rasionalitas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan subyek penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota X, Provinsi YZ. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan meninjau fenomena sosial dan masalah di lingkungan manusia berdasarkan metodologi (Tonasa & Setyorini, 2019). Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan jawaban bagaimana dan mengapa ada kecenderungan perilaku *fraud* ASN pada OPD Kota X, Provinsi YZ.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, yang didapatkan dari sumber langsung dengan menerapkan metode wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan dengan mekanisme pendekatan semi terstruktur, melalui pertanyaan yang telah disiapkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan akan jawaban atas persoalan penelitian. Wawancara kepada narasumber dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi hasil yang lebih lengkap terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan kecenderungan aparatur sipil melakukan *fraud* pada OPD Kota X, Provinsi YZ. Wawancara kepada narasumber juga dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan hasil yang didapatkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain wawancara, pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi dalam aktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Narasumber penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Tahapan penelitian ini diawali dengan wawancara kepada narasumber yang dilanjutkan dengan tahapan analisis data yaitu reduksi data, triangulasi sumber, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang sesuai dengan kriteria, kemudian dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya adalah reduksi data. Tahapan reduksi data bertujuan untuk memilah hasil wawancara dan observasi yang disesuaikan dengan kebutuhan persoalan penelitian. Adanya tahapan reduksi data menghasilkan informasi yang akurat dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahapan selanjutnya dilakukan triangulasi sumber untuk menggali kebenaran informasi narasumber dan menguji keabsahan data, sehingga objektivitas dari hasil analisis data lebih teruji. Tahapan triangulasi ini juga dilakukan untuk memastikan konsistensi jawaban narasumber dengan membandingkan hasil wawancara narasumber dengan pertanyaan yang sejenis. Dalam tahapan penyajian data, data yang telah didapatkan disajikan secara deskriptif yang akan digunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Tahapan akhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dari hasil analisis terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan kecenderungan *fraud* pada OPD Kota X, Provinsi YZ.

4. Hasil dan Pembahasan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota X, Provinsi YZ merupakan salah satu unsur yang membantu Kepala Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada kegiatan operasionalnya OPD Kota X memiliki tugas untuk membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif. OPD Kota X dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian lembaga dinas terkait. OPD Kota X dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh (3) tiga asisten yaitu Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan, masing-masing asisten akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan membawahi 3 (tiga) bagian yang telah ditetapkan Walikota.

Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Umum. Uraian tugas Asisten Administrasi Umum adalah membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan organisasi, protokol, kepegawaian, umum, dan keuangan. Hal ini juga selaras dengan pernyataan oleh Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota X sebagai berikut:

“Tugas dalam bagian ini salah satunya memfasilitasi pelayanan kepala desa meliputi protokolar, dokumentasi dan publikasi pimpinan, serta komunikasi pimpinan”

Kemudian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat akan mengkoordinasi dan membawahi Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pemerintahan. Asisten ini memiliki tugas pokok untuk membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan penyusunan kebijakan daerah dan penyusunan program di bagian pemerintahan dan hukum, serta mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dan penyusunan program di bagian kesejahteraan rakyat. Dari penyusunan tugas pokok Asisten ini, nantinya akan dilaksanakan oleh bagian dan sub bagian yang dibawah oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Hal itu sesuai dengan penuturan dari salah satu ASN Bagian Pemerintahan Kota X, sebagai berikut:

“Tugas yang dijalankan di Bagian Pemerintahan ini biasanya melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan biasanya dalam hal perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah, dan di Bagian Pemerintahan saya sendiri juga sebagai pelaksana pada sub bagian Kerjasama dalam negeri di bagian pemerintahan”

Hal ini juga didukung dari penuturan ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota X, sebagai berikut:

“Tugas Bagian Kesra membantu dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan, pelaporan kegiatan di bidang administrasi, dan fasilitasi seperti fasilitasi keagamaan, kesehatan, dan memfasilitasi pendidikan”

Asisten Perekonomian dan Pembangunan akan mengkoordinasi dan membawahi Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas sebagai pembantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan kebijakan daerah dalam hal administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di OPD Kota X, Provinsi YZ dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh ASN. Kecenderungan ASN ingin melakukan tindakan *fraud* dapat ditinjau dari beberapa hal seperti kebutuhan individu, kepentingan individu, dan tidak adanya rasa puas dalam diri individu sehingga hal itu dapat mendasari niat ASN untuk melakukan *fraud*. *Fraud* yang masih sering ditemukan di OPD Kota X adalah *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan oleh ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota X, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Fraud yang masih sering saya temuin biasanya terkait dengan pengadaan barang/jasa tidak sesuai regulasi karena adanya tekanan pimpinan dalam memilih penyedia, padahal regulasi dari pengadaan barang dan jasa sendiri dimulai dari perencanaan, persiapan, pengadaan melalui pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima tetapi karena ada tekanan dari pimpinan menyebabkan ASN disini ada yang melakukan kecurangan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa”

Kecurangan atau *fraud* lain yang teridentifikasi di OPD Kota X adalah *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan aset yang ada di daerah, hal ini diungkapkan oleh ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota X sebagai berikut:

“Kecurangan yang sering terjadi karena mungkin ada rasa kurang peduli terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) sehingga Barang Milik Daerah cenderung sering kali disalahgunakan oleh beberapa ASN”

Berdasarkan data penelitian yang telah berhasil ditemukan dan diidentifikasi di OPD Kota X, maka kecurangan-kecurangan tersebut dapat dikelompokkan dalam jenis *fraud* penyalahgunaan aset atau *misappropriation assets*.

Dari data yang berhasil diidentifikasi di bagian sebelumnya terkait dengan *fraud* di OPD Kota X, maka bentuk *fraud* yang ditemukan berupa *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan aset. Selanjutnya hasil dari identifikasi jenis *fraud* yang terjadi, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor penyebab *fraud* yang dilakukan oleh ASN di OPD Kota X dengan menggunakan pendekatan *fraud diamond*. Terdapat 4 elemen faktor yang dapat menyebabkan ASN di OPD Kota X, Provinsi YZ melakukan *fraud*, diantaranya adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*).

Elemen faktor pertama yang menyebabkan ASN cenderung ingin melakukan *fraud* adalah tekanan (*pressure*). Faktor tekanan muncul karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong pelaku kecurangan untuk melakukan *fraud*. Faktor internal seperti gaya hidup, pola pikir, karakter, dan integritas individu dinilai mampu menyebabkan seseorang untuk melakukan *fraud*. Faktor tekanan ekonomi dan lingkungan

kerja merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong seorang individu melakukan kecurangan. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan ASN di OPD Kota X menunjukkan hasil bahwa faktor tekanan yang mendorong seorang ASN cenderung melakukan kecurangan adalah pola pikir, karakter, dan integritas individu. Hal ini diungkapkan oleh ASN di Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kota X, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Biasanya kecurangan itu dilakukan karena beberapa faktor seperti halnya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang itu melakukan kecurangan. Faktor pertamanya biasanya dari faktor internal berupa pola pikir seseorang, kedua bisa berasal dari faktor eksternal berupa lingkungan dilihat dari sudut pandang psikis, kualitas kinerja, dan budaya”

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pernyataan dari ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Kota X, sebagai berikut:

“Kecurangan yang dilakukan oleh ASN bisa saja terjadi karena rendahnya pengawasan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), rendahnya take-home pay, dan budaya kerja yang buruk. Dengan adanya faktor itu, dan ada kemungkinan tidak dicegah maka seorang ASN yang memiliki karakter dan integritas yang buruk bisa menyebabkan ASN mudah untuk melakukan kecurangan”

Adanya faktor gaya hidup, tekanan ekonomi yang tidak sesuai dengan pemasukan, dan tekanan dari lingkungan kerja juga menjadi dorongan untuk ASN melakukan *fraud*, seperti yang diungkapkan oleh ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota X sebagai berikut:

“Ya sah-sah saja, kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi menurut saya jika ada ASN yang memiliki tekanan hidup maupun ekonomi, dan kebiasaan buruk pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan juga bisa menyebabkan ASN itu memiliki pemikiran untuk melakukan kecurangan”

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di OPD X bahwa tekanan hidup dan kebiasaan buruk pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan menyebabkan ASN cenderung ingin melakukan kecurangan, sebagai berikut:

“Yang bersangkutan harus kembali ke aturan-aturan yang ada dan belajar untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik karena tekanan hidup dan kebiasaan buruk yang tidak dicegah dapat memicu seseorang untuk melakukan kecurangan”

Pendapat tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu ASN Bagian Pemerintahan Kota X, sebagai berikut:

“Tekanan dalam tugas pekerjaan adalah sesuatu yang saya anggap biasa, karena terkadang ada kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan dan saya harus melaksanakan pekerjaan itu karena ada disposisi sehingga saya harus kerjakan tetapi

tidak menutup kemungkinan juga jika ada tekanan yang tidak terkontrol bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan segala cara untuk menyelesaikan tugasnya”

Selanjutnya, faktor yang menjadi motif individu untuk melakukan kecurangan adalah kesempatan (*opportunity*). Faktor kesempatan ini muncul karena akibat dari lemahnya pengendalian internal. Dengan lemahnya pengendalian internal yang ada di OPD Kota X menyebabkan ASN cenderung mudah melakukan *fraud*. Hal ini diungkapkan oleh ASN Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota X, sebagai berikut:

“Menurut saya pengendalian yang sudah diterapkan disini kurang efektif karena terkadang tidak sesuai pengendalian itu kurang sesuai bagian-bagian yang ada disini, contohnya saja dilakukan penilaian kualitas kinerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja, namun aplikasi tersebut saya pikir kurang maksimal untuk menilai kualitas kinerja ASN dimana menilai kualitas kinerja menjadi salah satu hal untuk mengukur pengendalian internal”

Kecenderungan *fraud* juga dapat terjadi karena kurangnya pengawasan akses informasi sehingga terdapat celah kesempatan untuk individu melakukan kecurangan. Data wawancara menunjukkan hasil bahwa pengawasan akses informasi di OPD Kota X dinilai masih kurang karena pengawasan hanya terpusat pada satu dinas saja sehingga masih ada kemungkinan ASN di OPD Kota X melakukan *fraud*. Hal tersebut diungkapkan oleh ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota X, sebagai berikut:

“Menurut saya kurang adanya pengawasan dan sosialisasi apalagi pengawasan hanya dilakukan oleh Diskominfo saja”

Selain itu, faktor lain yang menjadi motif pelaku kecurangan cenderung ingin melakukan *fraud* adalah rasionalisasi (*rationalization*). Faktor rasionalisasi ini muncul karena adanya pembenaran bahwa pelaku secara sadar membenarkan tindakan yang dilakukan adalah hal yang normal. Dari hasil wawancara dapat menunjukkan bahwa faktor rasionalisasi ini didukung oleh respon di lingkungan yang tidak ingin mengungkap adanya tindakan *fraud* yang dilakukan pelaku dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan dapat ditoleransi. Dengan adanya respon dan pemikiran di lingkungan seperti itu, maka akan menyebabkan ASN mudah melakukan *fraud* karena memiliki anggapan tindakan yang dilakukan sah-sah saja. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota X, sebagai berikut:

“Saya diam saja dan akan melihat secara komprehensif terlebih dahulu. Barangkali, karena umur kerja yang masih pendek ternyata bukan sikap curang melainkan perbedaan atau kesalahpahaman”

Dalam wawancara dengan ASN Bagian Pemerintahan Kota X juga menyampaikan hal serupa, sebagai berikut:

“Mungkin saya tidak akan melaporkan terlebih dahulu karena jika saya melihat dan mengetahui ada yang melakukan kecurangan saya hanya akan menasehati saja karena mungkin ada misscommunication”

Elemen terakhir yang menjadi motif kecenderungan melakukan *fraud* adalah faktor kemampuan (*capability*). Individu yang memiliki jabatan dan kewenangan yang lebih tinggi cenderung akan memiliki kemampuan untuk melakukan *fraud* dengan mudah. Jabatan dan kewenangan yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan individu untuk memanfaatkan peluang adanya *fraud*. Berdasarkan hasil wawancara dapat diidentifikasi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ASN cenderung melakukan *fraud* karena adanya faktor kemampuan seperti jabatan dan posisi seorang ASN yang tinggi di dalam organisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh ASN Bagian Pemerintahan Kota X, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pastinya sangat berpengaruh karena menurut saya sendiri seorang ASN yang memiliki jabatan dan posisi tinggi akan memiliki akses lebih untuk mencari celah kecurangan dan biasanya yang punya jabatan tinggi itu lebih tahu kelemahan yang ada di organisasi”

Hal itu juga selaras dengan pernyataan wawancara dari ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota X, dalam kutipan berikut ini:

“Pastinya sangat berpengaruh karena menurut saya sendiri seorang ASN yang memiliki jabatan dan posisi tinggi akan memiliki akses lebih untuk mencari celah kecurangan dan biasanya yang punya jabatan tinggi itu lebih tahu kelemahan yang ada di organisasi”

Penelitian ini dapat mengidentifikasi motif kecenderungan *fraud* pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota X. Secara ringkas temuan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. Hasil penelitian dapat mengungkapkan bahwa masih terdapat kecenderungan *fraud* di OPD Kota X Provinsi YZ berupa *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa serta *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD). *Fraud* tersebut terjadi akibat dari *controlling* yang kurang di OPD Kota X sehingga ada kesempatan untuk ASN di OPD Kota X melakukan tindakan *fraud* tersebut. Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners* (2016) bentuk *fraud* yang cenderung dilakukan oleh ASN di OPD Kota X dapat dikategorikan dalam jenis *fraud* penyalahgunaan aset (*misappropriation assets*). *Fraud* yang diungkapkan oleh ASN di OPD Kota X ini didasari karena adanya niat dalam diri individu untuk melakukan kecurangan. *Fraud* yang terjadi di OPD Kota X ini juga didukung dengan adanya faktor tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Selain itu, adanya faktor kemampuan yang dimiliki seorang ASN juga menjadi faktor ASN untuk melakukan *fraud*. Faktor tersebut menjadi bukti bahwa kecenderungan ASN melakukan *fraud* didorong dengan adanya motif sebagaimana diargumentasikan dalam *Fraud Diamond Theory*.

Komponen *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Faktor tekanan menjadi dorongan ASN di OPD Kota X untuk melakukan *fraud*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa faktor tekanan yang ada di OPD Kota X disebabkan karena adanya dorongan dari faktor internal dan eksternal. Sesuai dengan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa faktor internal dari tekanan didorong oleh faktor pola pikir, karakter individu, integritas individu, dan gaya hidup individu yang

menyebabkan ASN di OPD Kota X cenderung ingin melakukan *fraud*. Adapun, faktor eksternal dari tekanan yang menyebabkan ASN di OPD Kota X cenderung ingin melakukan *fraud* dikarenakan adanya tekanan ekonomi dan lingkungan kerja.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

No	Elemen <i>Fraud Diamond Theory</i>	Motivasi <i>Fraud</i>
1	<i>Pressure</i> Dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> - Pola pikir, karakter individu, dan integritas individu yang buruk - Gaya hidup sebagian ASN yang tidak sesuai dengan penghasilan - Tekanan ekonomi individu - Tekanan lingkungan kerja di OPD Kota X yang kurang sesuai dengan regulasi
2	<i>Opportunity</i> Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan karena pengendalian internal dan pengawasan akses yang lemah.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang efektifnya pengendalian internal yang diterapkan di OPD Kota X karena terkadang pengendalian internal yang dilakukan tidak sesuai dengan sebagian bagian di OPD pada Kota X. - Kurangnya pengawasan akses informasi di OPD Kota X karena hanya ada pada satu tempat saja
3	<i>Rationalization</i> Adanya pembenaran bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang sah-sah saja	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya ASN di OPD Kota X yang cenderung diam saja ketika mengetahui terdapat individu yang melakukan <i>fraud</i> - Kurang adanya keberanian dari ASN di OPD Kota X untuk melaporkan tindakan <i>fraud</i> sehingga pelaku dengan mudah melakukan kecurangan
4	<i>Capability</i> Kemampuan untuk mengetahui peluang kecurangan karena didukung dengan adanya jabatan atau posisi di suatu organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan dan posisi yang lebih tinggi yang dimiliki ASN di OPD Kota X dengan mudah mencari peluang untuk melakukan kecurangan - Kemampuan ASN di OPD Kota X yang mampu mengatasi risiko pada saat melakukan kecurangan

Sumber : Data (diolah)

Selanjutnya, adanya faktor kesempatan yang timbul akibat lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan akses informasi yang ada di OPD Kota X menjadi faktor untuk ASN melakukan *fraud*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal yang ada di OPD Kota X dinilai kurang efektif untuk dilakukan karena terkadang pengendalian yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan sebagian bagian di OPD Kota X. Kemudian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pengawasan akses informasi di OPD Kota X kurang menyeluruh karena dalam praktiknya pengawasan hanya dilakukan satu tempat sehingga ada kemungkinan ASN di Kota X melakukan *fraud* dengan mudah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari

Didi & Kusuma (2018) dimana pengendalian internal yang buruk akan menyebabkan individu cenderung mudah untuk melakukan *fraud*.

Selain itu, terdapat beberapa ASN di OPD Kota X yang memilih untuk diam saja dan tidak melapor jika melihat dan mengetahui tindakan *fraud* yang mengakibatkan pelaku *fraud* di OPD Kota X merasa bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sah-sah saja. Hal itu membuktikan bahwa faktor rasionalisasi menjadi salah satu elemen faktor yang menyebabkan seorang pelaku *fraud* di OPD Kota X melakukan kecurangan secara terus-menerus. Kemudian, faktor kemampuan untuk mengenali peluang kecurangan yang dimiliki seorang ASN di OPD Kota X juga menjadi dorongan untuk pelaku *fraud* dengan mudah memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan *fraud*. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wijayanto (2020) yang mengungkapkan bahwa jabatan dan posisi di organisasi yang dimiliki menjadi salah satu bentuk pengaruh faktor kemampuan untuk melakukan *fraud*.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil analisis bahwa di dalam OPD Kota X masih terdapat kecenderungan ASN melakukan *fraud* dalam bentuk penyalahgunaan aset. Adapun penyebab *fraud* tersebut terjadi dikarenakan bentuk *fraud* yang terjadi di OPD Kota X dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja *Fraud Diamond Theory* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Hasil penelitian ini mengkonfirmasi dan sejalan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Haurissa & Dewi (2021). Dari hasil observasi dapat dianalisis bahwa faktor yang lebih dominan yang menyebabkan ASN di OPD Kota X cenderung melakukan *fraud* adalah faktor kesempatan (*opportunity*) dan kemampuan (*capability*). Kedua faktor tersebut adalah faktor paling dominan untuk memungkinkan melakukan tindakan kecurangan dengan mudah, terutama jika terdapat kesempatan yang tepat untuk melakukan tindakan kecurangan dengan didukung dengan jabatan dan posisi ASN yang dimiliki pada organisasi.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *Fraud Diamond Theory* dapat menjelaskan motif yang menyebabkan ASN di OPD Kota X cenderung melakukan *fraud*. Dorongan dari faktor tekanan (*pressure*) berupa gaya hidup, pola pikir, karakter, integritas individu, tekanan ekonomi, dan lingkungan kerja. Kurangnya *controlling* dan lemahnya pengendalian internal memunculkan faktor kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan *fraud* dengan mudah. Selanjutnya, faktor rasionalisasi (*rasionalization*) yang dapat dilihat dari respon lingkungan yang menganggap bahwa kecenderungan *fraud* di OPD Kota X adalah tindakan yang sah-sah saja. Lebih lanjut, faktor kemampuan (*capability*) seperti jabatan dan posisi seseorang dalam organisasi juga menjadi motif untuk melakukan *fraud*. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa *fraud* yang ditemukan pada OPD Kota X dapat dikategorikan dalam kecurangan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Munculnya *fraud* tersebut dikarenakan terdapat faktor dominan ASN melakukan tindakan kecurangan yaitu kesempatan dan kemampuan, sehingga diperlukan mitigasi risiko dan pengawasan terhadap faktor yang menyebabkan kecenderungan perilaku *fraud* yang dilakukan ASN pada OPD Kota X.

Topik penelitian kecurangan (*fraud*) mengakibatkan narasumber kurang terbuka dalam mengungkapkan tindakan kecurangan pada saat wawancara dan observasi menjadi keterbatasan penelitian ini. Penelitian mendatang dapat memperluas subyek penelitian dengan perspektif yang berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan antar objek penelitian dan dapat mengungkapkan hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2016). Survei Fraud Indonesia 2016. *Auditor Essentials*, 1–60.
- ACFE. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Airlangga, U. (2020). Model penerapan akuntansi sektor publik untuk mencegah fraud pada sektor publik di era digital. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 22(2), 289–304. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732>
- Avianto, H., Alim, M. N., & Tarjo. (2019). The effect of monopoly power and integrity on the tendency to commit fraud in e-procurement. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(1), 112–120. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.19.04.01.14>
- Chandra, D. P., & Ikhsan, S. (2014). Determinan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud) pada dinas pemerintah se-kabupaten Grobogan. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v4i3>
- Data Indonesia. (2022, July 22). Kejaksaan Agung tangani 371 kasus korupsi sepanjang 2021. *Data Indonesia*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejaksaan-agung-tangani-371-kasus-korupsi-sepanjang-2021>
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud): Persepsi pegawai pemerintahan daerah kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Farah, W., & Rahmawati, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi niat melakukan kecurangan (fraud) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). *Akuntabilitas*, 14(1), 127138. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.20872>
- Fransiska, I. S., & Utami, H. (2019). Perilaku kecurangan akademik mahasiswa: Perspektif fraud diamond theory. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 316–323. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p316>
- Haurissa, N. F., & Dewi, C. N. (2021). Fraud di pemerintahan analisis meta: Studi di Indonesia. *Perspektif Akuntansi*, 4(3), 297–319. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i3.p297-319>
- Kompas. (2022, April 29). Korupsi PPh ASN di Salatiga selama 10 tahun pensiunan divonis 9,5 tahun penjara. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/29/090253978/korupsi-pph-asn-di-salatiga-selama-10-tahun-seorang-pensiunan-divonis-95>
- Mardatillah, Jusuf, I., & Antun, M. (2020). Phenomena behavior fraud in government. *Journal of Applied Management*, 18(2), 300–306.
- Maria, E., Abdul, H., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Exploration opportunities to commit fraud in local governments, Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.01>
- Maulana, R., & Muftadi, N. A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan individu melakukan fraud dalam persepsi pegawai instansi pemerintahan kabupaten Brebes. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 3.

- Merawati, L. K., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Moralitas, pengendalian internal dan gender dalam kecenderungan terjadinya fraud. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 35. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.132>
- Peprah, W. K. (2018). Predictive relationships among the elements of the fraud diamond theory: The perspective of accountants. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 8(3), 141–148. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i3/4547>
- Permana, B. A., Perdana, H. D., & Kurniasih, L. (2017). Determinant of fraud in government agency: Empirical study at the finance and development supervisory agency (BPKP) of Jakarta representative office. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(1), 93. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.17.02.01.08>
- Prasmaulida, S. (2016). Financial statement fraud detection using perspective of fraud triangle adopted by SAS No. 99. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 317. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.24>
- Priyastiwati, P., & Setyowati, H. (2021). Kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa: Analisis fraud diamond dan religiusitas. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1.301>
- Purwanto, E., Mulyadi, J., & Anwar, C. (2017). Kajian konsep diamond fraud theory dalam menunjang efektivitas pengadaan barang/jasa di pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 149. <https://doi.org/10.25124/jmi.v17i3.1153>
- Puspasari, N. (2015). Fraud theory evolution and its relevance to fraud prevention in the village government in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.15>
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The effect of individual morality and internal control on the propensity to commit fraud: Evidence from local governments. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(1), 208. <https://doi.org/10.22146/jieb.15291>
- Radar Semarang, J. P. Serapan anggaran tiga OPD di Pemkot Salatiga tinggi. *Radar Semarang Jawa Pos*. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/salatiga/2022/01/05/serapan-anggaran-tiga-opd-di-pemkot-salatiga-tinggi/> (2022, January 5).
- Ramadhani, A. R., Triyuwono, I., Purwanti, L., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). Mengungkap cara melakukan praktik fraud di Pemerintah Kota Malang, *Riset akuntansi dan keuangan Indonesia* 4(1), 53–66. <http://journals.ums.ac.id/index.php/>
- Rokhim, S., & Jaya, I. M. L. M. (2021). Determinan terjadinya fraud di lingkungan pemerintahan. *Gorontalo, Accounting Journal*, 4(2), 123. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1517>
- Romney, M. B. & Steinbart, P. J. (2011). *Accounting Information Systems, Enhanced eBook, Global Edition (15th Edition)*. Pearson International Content. <https://bookshelf.vitalsource.com/books/9781292353371>
- Sujeewa, G. M. M., Yajid, M. S. A., Khatibi, A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The new fraud triangle theory - Integrating ethical values of employees. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(5), 52–57. http://ijbel.com/wp-content/uploads/2018/08/ijbel5_216.pdf
- Sulistiyo, A. B., Al Ardi, R. D., & Roziq, A. (2020). Implementasi the new fraud triangle model dengan perspektif syariah dalam mendeteksi perilaku fraud. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(1), 21–46. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4324>
- Tonasa, M., & Setyorini, C. T. (2019). Reasons for accounting students to commit academic fraud: Qualitative interview studies. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*, 21(1), 23–31. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jame>

- Wijayanto, F. L. (2020). Komitmen organisasi, kapabilitas, gaya kepemimpinan dan kecenderungan fraud di sektor pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara di kota Salatiga). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 120. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24422>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the four elements of fraud, *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 49–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5>